

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN INVESTASI PMDN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PULAU SUMATERA

Sherly Adelia Ahyani Saputri¹; Antoni Sitorus²

Universitas Bengkulu, Bengkulu^{1,2}

Email: sherlyadeliaahyani@gmail.com¹; sitorusantoni62@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023. Metode penelitian ini menggunakan Panel Least Squares (PLS) dengan pendekatan data panel, melibatkan 10 provinsi di Sumatera dengan 50 observasi panel yang seimbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independent pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Secara spesifik, koefisien regresi untuk pengeluaran pemerintah sebesar -0,007801 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,007801 ribu jiwa (sekitar 7,8 orang). Koefisien UMP sebesar -0,146798 menunjukkan bahwa setiap peningkatan UMP sebesar 1 juta rupiah akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,146798 ribu jiwa (sekitar 147 orang). Koefisien PMDN sebesar -0,010232 berarti setiap peningkatan PMDN sebesar 1 miliar rupiah akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,010232 ribu jiwa (sekitar 10 orang). Secara simultan, ketiga variabel ini mampu menjelaskan 97,22% dari variasi jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan pengeluaran pemerintah, peningkatan UMP, dan investasi PMDN di wilayah Sumatera sangat efektif dalam menekan angka kemiskinan.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah; Upah Minimum Provinsi; Penanaman Modal Dalam Negeri; Jumlah Penduduk Miskin

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of government spending, UMP, and PMDN on the number of poor people on Sumatra Island during the 2019-2023 period. The research method used is Panel Least Squares (PLS) with a panel data approach, involving 10 provinces in Sumatra with 50 balanced panel observations. The research results show that the three independent variables government expenditure, UMP, and PMDN have a significant and negative effect on the number of poor people. Specifically, the regression coefficient for government expenditure of -0.007801 indicates that every increase in government expenditure of 1 billion rupiah will reduce the number of poor people by 0.007801 thousand people (around 7.8 people). The UMP coefficient of -0.146798 shows that every increase in the UMP of 1 million rupiah will reduce the number of poor people by 0.146798 thousand people (around 147 people). The PMDN coefficient is -0.010232, meaning that every increase in PMDN of 1 billion rupiah will reduce the number of poor people by 0.010232 thousand people (around 10 people). Simultaneously, these three variables are able to explain 97.22% of the variation in the number of poor people on the island of Sumatra. Thus, economic policies that focus on

increasing government spending, increasing the UMP, and PMDN investment in the Sumatra region are very effective in reducing poverty rates.

Keywords : Government Expenditures; Provincial Minimum Wage; Domestic Investment; Number of Poor People

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan beragam, menghadapi kondisi sosial-ekonomi yang bervariasi di setiap daerahnya. Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah penting dalam perekonomian Indonesia, memiliki potensi ekonomi besar yang tersebar di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, hingga industri (Antoni, 2023). Meskipun demikian, wilayah ini masih dihadapkan dengan masalah kemiskinan yang cukup signifikan, di mana sejumlah provinsi mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi meskipun telah dilaksanakan berbagai kebijakan ekonomi.

Pada periode 2019-2023 pengeluaran pemerintah, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tiga faktor ekonomi yang diyakini berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera (Syiffa, 2023). Pengeluaran pemerintah yang mencakup belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan angka kemiskinan (Febriani & Rambe, 2023). Demikian pula, UMP sebagai instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat juga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, sementara PMDN diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan di masyarakat (Septadarman, 2024).

Meskipun terdapat upaya signifikan dari pemerintah tantangan kemiskinan di Sumatera masih belum sepenuhnya teratasi. Provinsi-provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menunjukkan angka kemiskinan yang relatif tinggi, bahkan ketika terjadi peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan investasi (Simanjuntak, 2024). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan fiskal serta regulasi UMP dalam mengatasi kemiskinan di Sumatera (Pasaribu, 2023). Fenomena ini juga menunjukkan bahwa peningkatan investasi dan kebijakan upah yang progresif tidak begitu saja dapat menurunkan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi secara merata (Rusdi, 2024).

Salah satu hambatan signifikan dalam penurunan angka kemiskinan di Sumatera adalah ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi. Investasi dan pengeluaran

pemerintah cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara masyarakat di pedesaan kesulitan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi (Anitasari, 2023). Sebagai contoh, pada tahun 2023, provinsi Aceh mengalami penurunan dalam pengeluaran pemerintah sebesar Rp11.093,86 miliar dari tahun sebelumnya, namun investasi PMDN mengalami kenaikan menjadi Rp8.883,3 miliar. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut tetap stagnan di sekitar 807.000 jiwa (Anggraini Rambe, 2024). Polanya juga terlihat di provinsi lain seperti Riau, yang pada tahun 2023 mencatat pengeluaran pemerintah sebesar Rp10.515,17 miliar dan investasi PMDN mencapai Rp48.243,3 miliar, namun angka kemiskinan masih bertahan di 486.000 jiwa. Situasi ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi saja belum cukup untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan tanpa adanya distribusi manfaat yang merata (Murniati, 2022).

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keterkaitan antara Pengeluaran Pemerintah, UMP, dan Investasi PMDN terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera pada periode 2019-2023. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan wawasan yang lebih luas tentang efektivitas kebijakan ekonomi di setiap provinsi dalam menurunkan angka kemiskinan. Lebih jauh, penelitian ini akan menawarkan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam memaksimalkan pengaruh positif dari kebijakan upah, pengeluaran pemerintah, dan investasi agar dampaknya lebih merata, terutama di wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin mengacu pada populasi yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai tingkat pendapatan yang tidak mencukupi dalam mengakomodasi kebutuhan pokok hidup. Garis kemiskinan ini biasanya dihitung berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga yang mencakup harga kebutuhan pokok serta akses terhadap layanan publik. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan ekonomi, tingkat pendidikan, akses terhadap lapangan kerja, dan distribusi pendapatan (Prasetyo, 2020).

Salah satu teori yang relevan dengan kemiskinan adalah Teori Kemiskinan Struktural, yang dikemukakan oleh Oscar Lewis pada tahun 1960-an. Menurut teori ini, kemiskinan disebabkan oleh struktur ekonomi dan sosial yang tidak memberikan

kesempatan yang cukup bagi individu untuk keluar dari kondisi kemiskinan (Erhard, 2024). Penelitian oleh (Dewi, 2022) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor sosial berperan signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, terutama di daerah-daerah tertinggal. Penelitian lain oleh (Yasni & Yulianto, 2020) menemukan bahwa kenaikan UMP secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dampaknya lebih terasa di wilayah perkotaan. Penelitian ini akan menguji kembali bagaimana variabel-variabel seperti pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembiayaan operasional, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas publik serta program-program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut (Bennee et al., 2021), pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan menjadi pengeluaran rutin, seperti gaji pegawai negeri, dan pengeluaran modal yang mencakup investasi pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Fungsi utama pengeluaran pemerintah adalah sebagai instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyeimbangkan distribusi pendapatan melalui program-program yang meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Salah satu teori yang relevan dengan pengeluaran pemerintah adalah Teori Fungsi Alokasi dan Distribusi yang dikemukakan oleh Richard Musgrave (1959). Menurut teori ini, salah satu fungsi pengeluaran pemerintah adalah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendistribusikan pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial (Shakoori, 2021). Studi oleh (Mhlanga, 2021) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada infrastruktur dan sektor sosial seperti kesehatan dan pendidikan secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Demikian juga, penelitian oleh (Xiao et al., 2022) menyimpulkan bahwa peningkatan belanja modal pemerintah berkorelasi positif dengan penurunan jumlah penduduk miskin, khususnya di daerah pedesaan.

H1: Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan besaran upah paling rendah yang ditentukan pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan. UMP ditujukan untuk melindungi pekerja agar mendapatkan penghasilan yang layak, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka (Pelle et al., 2024). Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, penetapan UMP mempertimbangkan beberapa aspek seperti inflasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. UMP diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, terutama di sektor formal, serta mengurangi kesenjangan pendapatan di antara berbagai kelompok pekerja.

Teori yang relevan dengan konsep upah minimum adalah Teori Upah Efisiensi yang dikemukakan oleh George Akerlof pada tahun 1980-an. Teori ini menyatakan bahwa pemberian upah yang lebih tinggi dari tingkat upah pasar dapat meningkatkan produktivitas pekerja, mengurangi turnover, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan (Fei, 2022). Studi oleh (Permana & Pasaribu, 2023) menemukan bahwa kenaikan UMP berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat di wilayah perkotaan, pada akhirnya dapat memperkecil angka kemiskinan. Studi lainnya oleh (Zaring, 2024) menunjukkan bahwa peningkatan UMP di Jawa Tengah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, meskipun dampaknya lebih kecil pada pekerja sektor informal.

H2: Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

Penanaman Modal dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ialah investasi yang dilakukan oleh entitas lokal atau warga negara Indonesia di dalam negeri. PMDN biasanya diarahkan pada beberapa sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan jasa, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), PMDN merupakan bagian penting dari perekonomian nasional karena menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong transfer teknologi di antara pelaku usaha domestik. Investasi ini juga berfungsi sebagai penggerak perekonomian lokal yang secara langsung memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar (Ramadhan et al., 2021).

Salah satu teori yang relevan dengan PMDN adalah Teori Investasi Keynesian, yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (1936). Teori ini menjelaskan bahwa investasi merupakan komponen penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi karena investasi dapat meningkatkan permintaan agregat, memperluas kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja (Kingu, 2024). Studi oleh (Ni Kadek et al., 2024) menemukan bahwa PMDN secara signifikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan pertanian, yang secara tidak langsung mengurangi jumlah penduduk miskin. Penelitian lain oleh (Sahrul et al., 2023) juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa peningkatan investasi PMDN dapat mempercepat pengurangan kemiskinan, khususnya di daerah yang memiliki basis pertanian yang kuat.

H3: Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menerapkan metode analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews. Data yang digunakan dalam studi ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari BPS dan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mencakup 10 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung Dan Lampung. Periode analisis mencakup tahun 2019 hingga 2023, menghasilkan 50 observasi panel yang seimbang. Pemilihan model dilakukan melalui serangkaian uji, termasuk uji Chow untuk menetapkan antara model Common Effect dan Fixed Effect, serta uji Hausman untuk memutuskan model terbaik antara Fixed Effect dan Random Effect. Uji hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi tingkat signifikansi dari nilai probabilitas. Hipotesis diterima apabila nilai p-value dibawah 0,05 yang menyatakan adanya pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi data panel yang digunakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
 β_0 : Konstanta
 X_{1it} : Pengeluaran Pemerintah (miliar rupiah)

X_{2it}	: Upah Minimum Provinsi (juta jiwa)
X_{3it}	: Penanaman Modal Dalam Negeri (miliar rupiah)
E_{it}	: Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Panel

1. Uji Chow

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa model yang terpilih dari uji data panel antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) ialah model Fixed Effect Model (FEM). Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas dari Cross-section F-statistic sebesar 0.0000 dan Cross-section Chi-square sebesar 0.0000, yang keduanya berada di bawah nilai ambang batas signifikansi 0,05. Sehingga, hasil uji Chow ini mengindikasikan yakni model FEM lebih relevan digunakan dalam penelitian ini dibandingkan model CEM, karena adanya perbedaan yang signifikan antara cross-sections (provinsi) yang diteliti. Model FEM memungkinkan adanya variasi antar cross-sections, sehingga hasil analisis lebih akurat dalam menggambarkan pengaruh variabel independen seperti pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN terhadap jumlah penduduk miskin di setiap provinsi di Sumatera.

2. Uji Hausman

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang ditampilkan pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) yakni model Fixed Effect Model (FEM). Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas dari Chi-Square sebesar 0.0016, yang kurang dari tingkat signifikan yang ditentukan yakni 0,05. Dengan demikian, uji Hausman ini mengindikasikan adanya korelasi signifikan antara variabel independen dengan error term, sehingga model FEM lebih cocok digunakan dibandingkan REM. Model FEM lebih mampu menangkap perbedaan spesifik di setiap cross-section (provinsi) yang diteliti, sehingga lebih akurat dalam menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1 yang menampilkan uji asumsi klasik normalitas terhadap residual model, dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.278245, yang berada di atas ambang batas

signifikansi 0.05. Maka, data residual memenuhi asumsi normalitas, artinya model regresi yang diterapkan penelitian ini tidak adanya kendala pada distribusi residual. Hal ini penting karena normalitas residual adalah salah satu ketentuan uji klasik yang harus dipenuhi agar hasil estimasi model regresi panel dapat diinterpretasikan dengan baik, sehingga dapat dipercaya dalam pengambilan kesimpulan.

2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode Breusch-Pagan-Godfrey yang ditampilkan dalam Tabel 3, dapat dikatakan bahwa data bebas dari masalah heteroskedastisitas. Ini menunjukkan dari nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.8314, yang lebih besar dari ambang batas signifikansi 0.05. Selain itu, nilai probabilitas dari F-statistic sebesar 0.8327 dan Scaled explained SS sebesar 0.8155 juga berada di atas 0.05, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa varians residual bersifat homoskedastik (konstan) di seluruh observasi. Dengan demikian, asumsi klasik heteroskedastisitas terpenuhi, dan model regresi yang digunakan dapat dikatakan reliabel untuk menghasilkan estimasi yang tidak biasa.

3. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas yang ditampilkan dalam Tabel 4 dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF), dapat dikatakan data tidak ada masalah multikolinieritas. Ini dapat dilihat dari nilai Centered VIF untuk variabel Pengeluaran Pemerintah (PP), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Investasi PMDN (IPMDN), yang semuanya berada di bawah angka ambang batas 10, masing-masing sebesar 1.224091, 1.052531, dan 1.259246. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi linear yang tinggi antar variabel independen dalam model, sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas yang signifikan. Model regresi yang diterapkan dapat dipercaya dalam mengestimasi hubungan antara variabel-variabel tanpa risiko distorsi yang disebabkan oleh multikolinieritas.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test yang ditampilkan dalam Tabel 5, hasilnya menunjukkan data bebas dari masalah autokorelasi. Terlihat dari nilai probabilitas Chi-Square Obs*R-squared sebesar 0.2535, yang lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05. Selain itu, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.2794 juga mendukung kesimpulan bahwa tidak ada

autokorelasi dalam model. Sehingga residual dari model regresi tidak mempunyai korelasi serial, sehingga model memenuhi asumsi klasik autokorelasi dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa khawatir adanya bias estimasi yang disebabkan oleh autokorelasi.

Uji Hipotesis

1. Uji t

Pada Tabel 6, pengujian hipotesis dengan metode Panel Least Squares, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Pengeluaran Pemerintah (PP), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Investasi PMDN, ketiga variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Jumlah Penduduk Miskin (JPM). Dibuktikan dari nilai probabilitas uji t untuk setiap variabel yang $< 0,05$: PP (0,0200), UMP (0,0093), dan PMDN (0,0030). Koefisien dari ketiga variabel menunjukkan arah pengaruh negatif, yang berarti bahwa peningkatan pada variabel independen cenderung mengurangi angka penduduk miskin di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Interpretasi koefisien pada setiap variabel sebagai berikut:

- a. Pengeluaran Pemerintah (PP) memperoleh koefisien sebesar -0,007801. Ini berarti, jika pengeluaran pemerintah meningkat senilai 1 miliar rupiah, maka jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,007801 ribu jiwa (atau sekitar 7,8 orang), dengan asumsi variabel lain konstan.
- b. Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki koefisien -0,146798. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya UMP senilai 1 juta rupiah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,146798 ribu jiwa (atau sekitar 147 orang), dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Investasi PMDN memiliki koefisien -0,010232. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan investasi PMDN sebesar 1 miliar rupiah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,010232 ribu jiwa (atau sekitar 10 orang), dengan asumsi variabel lain konstan.

2. Efek Tetap Provinsi

Berdasarkan Tabel 7, hasil menunjukkan adanya variasi signifikan antar wilayah di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara memiliki efek tetap tertinggi dengan nilai 699199,0 menunjukkan bahwa karakteristik khusus provinsi ini, seperti tingginya populasi atau aktivitas ekonomi yang kompleks, secara signifikan mempengaruhi

jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, Bangka Belitung menunjukkan efek tetap terendah yaitu -512022,3 yang mengindikasikan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik, seperti tingkat kemiskinan yang relatif rendah, kemungkinan akibat fokus pada sektor ekonomi tertentu.

3. R-squared

Secara keseluruhan, nilai R-squared sebesar 0.974387 dan Adjusted R-squared sebesar 0.972252 mengindikasikan dimana model ini mampu menjelaskan 97,44% variabilitas dalam jumlah penduduk miskin berdasarkan variabel independen dan efek tetap provinsi. Dengan demikian, model ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik dalam menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023.

4. Uji F

Pada Uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000, yang mana $<0,05$. Ini mengindikasikan secara simultan, ketiga variabel independen (PP, UMP, dan PMDN) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (JPM). Artinya, model regresi secara keseluruhan mampu menguraikan hubungan antara variabel independen dan dependen dengan baik. Nilai Durbin-Watson sebesar 1.925869 juga mengindikasikan tidak adanya masalah autokorelasi yang serius dalam model ini.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah (PP) berpengaruh signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera. Terlihat dari nilai koefisien regresi sebesar -0,007801 dan nilai probabilitas sebesar 0,0200 dimana $<0,05$. Hasil ini mengindikasikan setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,007801 ribu jiwa (sekitar 7,8 orang), dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Hal ini memperlihatkan bahwa alokasi anggaran yang ditujukan pada bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memberikan dampak positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatera.

Hasil penelitian ini relevan terhadap penelitian terdahulu yang juga menunjukkan dampak signifikan dari pengeluaran pemerintah terhadap pengurangan kemiskinan. Studi oleh (Amar et al., 2020) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah

pada sektor sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Penelitian oleh (Nwikina, 2024) juga menyimpulkan bahwa belanja modal pemerintah, khususnya di daerah pedesaan, berdampak langsung dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan menciptakan peluang kerja, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung literatur yang ada, yang menunjukkan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui alokasi anggaran yang efektif di sektor-sektor prioritas.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatra

Berdasarkan hasil analisis, Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatra. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,146798$ dengan nilai probabilitas $0,0093$, berada di bawah tingkat signifikansi $0,05$. Hasil tersebut membuktikan setiap kenaikan UMP senilai 1 juta rupiah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar $0,146798$ ribu jiwa (sekitar 147 orang), dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Dengan meningkatnya UMP, daya beli masyarakat, terutama kelompok pekerja dengan upah rendah, ikut terdongkrak sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Hasil kajian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang juga menunjukkan dampak positif dari peningkatan upah minimum terhadap penurunan kemiskinan. Misalnya, penelitian oleh (Ghozali, 2023) menemukan bahwa kenaikan UMP berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah perkotaan di Indonesia, di mana pekerja sektor formal lebih banyak memperoleh manfaat dari kenaikan tersebut. Penelitian lain oleh (Husni et al., 2023) juga menyimpulkan bahwa kenaikan UMP di Jawa Tengah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun dampaknya lebih terbatas pada sektor informal. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung literatur yang ada dan memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan upah minimum yang tepat dapat berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan di Pulau Sumatra.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatra

Berdasarkan hasil penelitian, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatra. Angka koefisien regresi sebesar $-0,010232$ dengan nilai probabilitas $0,0030$, yang $<0,05$ menyatakan peningkatan investasi domestik secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil tersebut menyatakan bahwa setiap meningkatnya PMDN sebesar 1 miliar rupiah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar $0,010232$ ribu jiwa (sekitar 10 orang), dengan asumsi variabel lain tetap. Investasi domestik memberikan dampak kontribusi positif terhadap penyediaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Hasil temuan ini relevan dengan kajian terdahulu yang juga menunjukkan peran penting PMDN dalam mengurangi kemiskinan. Studi oleh (Magdalena, 2020) menemukan bahwa peningkatan investasi domestik di sektor-sektor kunci seperti pertanian dan industri di daerah pedesaan secara signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin. Selain itu, penelitian oleh (Halid, 2023) menyimpulkan bahwa peningkatan investasi domestik berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan di daerah dengan basis ekonomi yang kuat, seperti Sumatra. Hasil penelitian ini memperkuat bukti bahwa PMDN adalah salah satu faktor utama yang dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatera melalui peningkatan kesempatan kerja dan penguatan sektor-sektor ekonomi lokal.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatra. Hasil uji F menjelaskan nilai probabilitas sebesar $0,0000$, mengindikasikan dimana semua variabel independen secara bersamaan berperan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN masing-masing berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui mekanisme yang berbeda. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan, kenaikan UMP yang meningkatkan daya beli masyarakat, serta peningkatan investasi domestik yang menciptakan lapangan kerja, semuanya berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin. Dengan nilai R-squared sebesar 0.974387 dan Adjusted R-squared sebesar

0.972252, variabel-variabel ini secara signifikan menjelaskan 97,44% variasi jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi di Pulau Sumatra. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan di sektor-sektor tersebut sangat efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan dimana Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatra selama periode 2019-2023. Hasil analisis membuktikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor-sektor strategis, kenaikan UMP yang meningkatkan daya beli pekerja, serta peningkatan investasi domestik yang menciptakan lapangan kerja baru secara bersama-sama mampu menekan angka kemiskinan di berbagai provinsi di Sumatra. Nilai R-squared sebesar 0.974387 dan Adjusted R-squared sebesar 0.972252, penelitian ini menegaskan yakni kebijakan-kebijakan di ketiga sektor tersebut efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, yaitu perlunya meningkatkan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, memperkuat regulasi terkait UMP agar dapat menyejahterakan pekerja, serta mendorong investasi dalam negeri yang lebih merata. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatra dan membantu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpino, M. A., & Rusdi, M. (2024). Analysis of Factors That Influence the Provincial Minimum Wage in SUMBAGSEL. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 397–406. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.4960>
- Antoni, S. (2023). Influence of Government Expenditure and Regional Economic Growth on The Human Development Index in Districts and Cities In Jambi Province 2019-2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 17(2), 524–530. <https://doi.org/10.55208/jebe.v17i2.465>
- Bennee, E., Okoye, P. V. C., & Amahalu, N. N. (2021). Effect of Public Expenditure on Economic Growth: A Case Study of Nepal (1975-2008). *Research Journal of Management Practice*, 1(12), 47–60. [https://elibrary.tucl.edu.np/handle/123456789/13557%0Ahttps://elibrary.tucl.edu.np/bitstream/123456789/13557/1/All thesis.pdf](https://elibrary.tucl.edu.np/handle/123456789/13557%0Ahttps://elibrary.tucl.edu.np/bitstream/123456789/13557/1/All%20thesis.pdf)
- Dewi, D. (2022). Kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 221–242. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.13>

- Erhard, F. (2024). Culture and poverty from a lifeworld stance: rehabilitating a controversial conceptual pair. *American Journal of Cultural Sociology*, 12(1), 1–24. <https://doi.org/10.1057/s41290-022-00170-5>
- Febriani, R. E., & Rambe, R. A. (2023). Measurement Efficiency of Local Government Spending on Poverty Alleviation in Sumatra: Output Oriented Approach With Data Envelopment Analysis. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(2), 348–362. <https://doi.org/10.35591/wahana.v26i2.842>
- Fei, H. (2022). Study on the Effectiveness of Minimum Wage and the Necessity of Abolishment by Countries. *Proceedings of the 2021 International Conference on Public Art and Human Development (ICPAHD 2021)*, 638(Icpahd 2021), 148–152. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220110.029>
- Ghozali, R. (2023). Factors Affecting the Welfare of Labors in Indonesia. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 4(3), 695–706. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i3.373>
- Halid, A., & Bempah, I. (2023). Pengaruh PDRB Sektor Pertanian, Daya Saing Umkm Pangan, Pengangguran Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 326–336. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5524>
- Husni, A. H. A. A., Rusli, A. ., Syamsu, S., & Ansar, M. C. (2023). Upah minimum dan tingkat kemiskinan: studi kebijakan di Indonesia minimum wage and poverty level: study of policy in Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 275–298.
- Kingu, J. (2024). Does the Keynesian Theory Matter on Economic Growth? Insights from Tanzanian Economy. *African Development Finance Journal*, 7(5), 1–22.
- Magdalena, S., & Suhatman, R. (2020). The Effect of Government Expenditures, Domestic Investment, Foreign Investment to the Economic Growth of Primary Sector in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 1692–1703. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1101>
- Mawati, D. N., & Anitasari, M. (2023). *The Effect of Government Expenditure, Consumption and Investment on the Economic Growth in City/District of Bengkulu Province* (Issue Bicemba). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-328-3_28
- Mhlanga, D. (2021). Artificial intelligence in the industry 4.0, and its impact on poverty, innovation, infrastructure development, and the sustainable development goals: Lessons from emerging economies? *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13115788>
- Murniati. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran melalui Jumlah Investasi di Kabupaten Malang. *Seiko: Journal of Management and Business*, 5(2), 189–202.
- Ni Kadek Sri Wahyuni, & Ida Bagus Putu Purbadharmaja. (2024). Analisis Disparitas Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 36–53. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5701>
- Nwikina, C. G., & Ekere, U. (2024). Does public capital expenditure reduce energy poverty? Evidence from Nigeria. *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 12(3), 36–50. <https://doi.org/10.37745/gjahss.2013/vol12n23650>
- Pelle, P. J., Maramis, R., & Lambonan, M. L. (2024). Implementasi Ketentuan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan

- Buruh. *Jurnal Fakultas Hukum*, 13(1).
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh Inflasi, Ipm, Ump Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1113–1132. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3516>
- Prasetyo, N. (2020). Risk : Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020. *Risk : Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 1(2), 56–71. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek>
- Putri, T. L., & Hutabarat, R. E. (2024). Analisis Pengaruh Pengangguran, Penanaman Modal dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 66–77.
- Ramadhan, A. W., Putri, G. S., & Putri, D. H. (2021). Hak Atas Tanah Sebagai Sarana Dalam Penanaman Modal. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 149. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.1618>
- Sahrul, S., Metekhoy, S., Pattilouw, D. R., & Sangadji, M. (2023). Dampak Keterbukaan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 1993-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1785–1799. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1242>
- Septadarman, A. C., & Rambe, R. A. (2024). Analysis of the Influence of Population Growth, Education, and Health on Poverty in Indonesia from 2018 to 2022. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), 129–142. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i1.7344>
- Setyo, S., & Angraini Rambe, R. (2024). Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Saat Pandemi Covid-19 Di Provinsi Aceh. *Media Ekonomi*, 31(2), 207–218. <https://doi.org/10.25105/me.v31i2.18313>
- Shakoori, A. (2021). Effects of the Government Taxation Policy on Distribution of Income with an emphasis on Human Development Index in Iran. *International Journal of Social Sciences (IJSS)*, 11(1), 2021. www.SID.ir
- Simanjuntak, R., & Yefriza, Y. (2024). Analysis Of Factors Affecting Provincial Minimum Wages In Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1369–1378. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5081>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Syiffa, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2013-2019. *Webinar Dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas*, 25(10), 392–399. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/87505/ANALISIS-FAKTOR-FAKTOR-YANG-MEMPENGARUHI-INDEKS-PEMBANGUNAN-MANUSIA-KABUPATENKOTA-DI-PROVINSI-BALI-PERIODE-2013-2019%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/87505/NDkyMzkw/ANALISIS-FAKTOR-FAKTOR-YANG-MEM>
- Xiao, H., Zheng, X., & Xie, L. (2022). Promoting pro-poor growth through infrastructure investment: Evidence from the Targeted Poverty Alleviation program in China. *China Economic Review*, 71(November 2020). <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101729>
- Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(1), 39–63. <https://doi.org/10.35837/subs.v4i1.819>
- Zaring, D. (2024). Hubungan Faktor Penduduk Usia Produktif , Upah dan Kontribusi

Sektor Konstruksi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Manokwari. *Lensa Ekonomi*, 18(04), 1–14.

Zuraida, N. A. (2024). Analisis Investasi Dalam Negeri, Upah Minimum, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL Volume*, 6(2), 1–23.

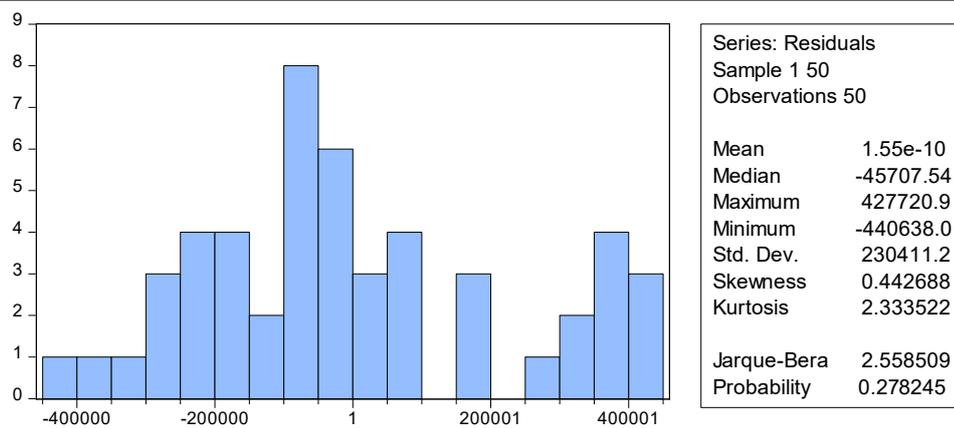
GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	562.436885	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	246.293423	9	0.0000

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.281650	3	0.0016



Gambar 1. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.289955	Prob. F(3,46)	0.8327
Obs*R-squared	0.875344	Prob. Chi-Square(3)	0.8314
Scaled explained SS	0.941085	Prob. Chi-Square(3)	0.8155

Tabel 4. Uji Multikoliniehtas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.63E+10	58.60860	NA
PP	91.80376	5.581720	1.224091
UMP	0.008647	60.03550	1.052531
IPMDN	13.30432	2.883655	1.259246

Tabel 5. Uji Autokorelasi

F-statistic	1.294138	Prob. F(2,44)	0.2794
Obs*R-squared	2.744625	Prob. Chi-Square(2)	0.2535

Tabel 6. Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.338143	0.234998	5.694277	0.0000
PP	-0.007801	0.003333	-2.340716	0.0200
UMP	-0.146798	0.055974	-2.622609	0.0093
IPMDN	-0.010232	0.003377	-3.030008	0.0030

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.974387	Mean dependent var	9233611.
Adjusted R-squared	0.972252	S.D. dependent var	9774118.
S.E. of regression	1628133.	Akaike info criterion	31.53841
Sum squared resid	9.54E+13	Schwarz criterion	31.70729
Log likelihood	-626.7681	Hannan-Quinn criter.	31.59947
F-statistic	456.5097	Durbin-Watson stat	1.925869
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 7. Estimasi FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.338143	0.234998	5.694277	0.0000
PP?	-0.007801	0.003333	-2.340716	0.0200
UMP?	-0.146798	0.055974	-2.622609	0.0093
IPMDN?	-0.010232	0.003377	-3.030008	0.0030
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	231921.8			
_BANGKA_BELITUNG--C	-512022.3			
_BENGKULU--C	-291612.6			
_JAMBI--C	-304745.5			
_KEPULAUAN_RIAU--C	-440701.3			
_LAMPUNG--C	441062.7			
_RIAU--C	-77206.74			
_SUMATERA_BARAT--C	-243072.8			
_SUMATERA_SELATAN--C	497177.7			
_SUMATERA_UTARA--C	699199.0			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.974387	Mean dependent var	9233611.	
Adjusted R-squared	0.972252	S.D. dependent var	9774118.	
S.E. of regression	1628133.	Akaike info criterion	31.53841	
Sum squared resid	9.54E+13	Schwarz criterion	31.70729	
Log likelihood	-626.7681	Hannan-Quinn criter.	31.59947	
F-statistic	456.5097	Durbin-Watson stat	1.925869	
Prob(F-statistic)	0.000000			